

# INSA NEWS

Published by Indonesian National Shipowners' Association



## Kinerja Pelayaran Dihantam Badai



[www.insa.or.id](http://www.insa.or.id)  
Edisi 13 2020



# Daftar Isi

Halaman 2-3



## LAPORAN UTAMA

### Hal. 4

Kinerja Pelayaran Dihantam Badai

### Hal. 6

Tantangan Perusahaan Pelayaran Disaat PSBB

### Hal. 8

Butuh Rp 1.600 T Hadapi Covid-19

### Hal. 10

Pemulihan Ekonomi Global di 2020 Tertahan Covid-19

## DUNIA PELAYARAN

INSA Keluhkan Masih Maraknya Penangkapan Kapal di Laut	13
Kemhub Minta Pasokan Logistik Laut Lancar	14
Ditengah Covid-19, Arus Barang Bahan Pokok Meningkat	15
Perjuangan Menhub Sembuh dari Covid-19	16
Pemerintah Terbitkan Permendag 40 Tahun 2020	17
Penguatan dan Layanan Sertifikasi Kapal Diperpanjang	18
Bakamla Perketat Pengamanan Jalur Masuk Pelabuhan Tikus	19
Dispensasi Perizinan di Bidang Kepelabuhanan	20
Permenhub Pengendalian Transportasi Mudik Diterbitkan	21
Triwulan I, Kinerja TPK Belawan Meningkat	22
Percepatan Persiapan Implementasi TSS Selat Sunda dan Lombok	23
Pemerintah Izinkan Semua Moda Transportasi Operasi Lagi	24
Dirjen Hubla Terbitkan SE Petunjuk Operasional Transportasi Laut	25

## SEPUTAR INSA

DPC INSA Surabaya Peduli dan Berbagi	27
DPC INSA Surabaya Berduka	28
Sosialisasi Permendag 40 Tahun 2020	29
Indonesia Maritim Webinar	30
Carmelita Terpilih "100 Business Woman of The Year"	31
DPC INSA Dumai Bagikan 500 Paket Sembako	32
Kepengurusan DPP INSA 2019-2023 Resmi Terbentuk	33

## INSA FOTO

Rakor Sosialisasi Larangan Mudik	37
INSA Hadiri Rapat Pembahasan PM 40 Tahun 2020	38
INSA Hadiri Rapat dengan Ditjen ESDM dan Guspenmigas	38
Rapat Bidang Tug And Barge INSA	39
INSA Hadiri Rakor Kemhub	40

Pimpinan Umum:  
**Carmelita Hartoto**

Wakil Pimpinan Umum/  
Penanggung jawab :  
**Budhi Halim**

Pimpinan Redaksi:  
**Darmansyah**

Pimpinan perusahaan  
**Nova Mugijanto**

Redaktur  
**Capt. Zaenal A. Hasibuan**

Reporter:  
**Fajar Sudrajat**  
**Hilman Muhammad**

Fotografer :  
**Team INSA**

Desainer grafis:  
**Andriansyah MK**

Published by:



Jl. Tanah Abang III No 10, Jakarta Pusat.  
T: (62-21) 3850993, 3447149, 3849522  
F: (62-21) 3849522  
Email: info@insa.or.id  
@: @dppinsa  
www.insa.or.id

# Kinerja Pelayaran Dihantam Badai

**Industri Pelayaran Nasional sebagaimana dialami banyak industri moda transportasi lainnya telah mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Diharapkan adanya stimulus beserta langkah-langkah tindakan pencegahan dan penanggulangannya.**

Pendapatan pelayaran nasional mengalami kemerosotan tajam. Dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan

penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, *liquid tanker*, *tug and barges*, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran *supporting* di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegotiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (*early termination*).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan *leasing*, asuransi dan *spare part* kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta.

**“Badai masih berlanjut, akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit.”**

Pelayaran berada pada keadaan yang sangat terjepit, dan sangat membutuhkan stimulus yang tepat dan cepat dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan sejumlah stimulus atas pandemi Covid-19, meski stimulus lainnya masih sangat ditunggu realisasinya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sejumlah stimulus yang telah direalisasikan pemerintah adalah dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan sertifikat *crewing* yang tidak membahayakan aspek keselamatan, dan juga dispensasi pemberlakuan penundaan *docking* untuk kapal yang sedang dalam masa operasional, mengingat saat ini galangan kapal sudah mengurangi jumlah pekerja lapangan karena terdampak Covid-19.

“INSA sangat mengapresiasi stimulus yang telah diberikan pemerintah ini, meski begitu kami masih sangat menanti realisasi stimulus lainnya untuk industri pelayaran,” kata Carmelita, Selasa (28/04/2020).

INSA telah menyampaikan sejumlah persoalan dan permintaan stimulus pelayaran kepada pemerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder pelayaran lainnya, dengan harapan masalah yang dihadapi dapat segera teratasi.

Sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan, dari sisi fiskal antara lain dari Kementerian Keuangan adalah pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang,

sedangkan dari sisi moneter dari OJK dan perbankan adalah pemberian *rescheduling* atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian *reconditioning* atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan PNPB yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayaran jasa kapal dan jasa barang. Para pelaku usaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian, perubahan sistem pembayaran yang semula melalui CMS (*Auto collection*) menjadi *Billing payment* dengan masa jatuh tempo 30 hari, yang semula *billing payment* delapan hari diubah menjadi 30 hari. Lalu mengubah *free time storage full and empty* untuk *inbound* (semula tiga hari) dan *outbound* (semula lima hari), menjadi tujuh hari dihitung satu hari. Serta menambah *free time transshipment* menjadi 14 hari.

**“Lain itu, diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negosiasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.”**

“Yang perlu dipikirkan itu dampak jika iklim usaha di pelayaran memburuk, karena kita tahu pelayaran ini padat karya. Pelayaran juga motor ekonomi bagi beberapa sektor terkait lainnya, seperti logistik, galangan, asuransi hingga ke instansi pendidik SDM pelaut,” pungkasnya. (\*)

## TANTANGAN PERUSAHAAN PELAYARAN DIKALA PSBB

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Diseases-19 (Covid-19). Kebijakan tersebut diantaranya mulai dari physical distancing, work from home (WFH), sekolah dari rumah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adanya kebijakan tersebut mengharuskan manajemen suatu perusahaan mengubah gaya kerjanya guna menjalankan arahan dari pemerintah.

**Seperti PT Pan Maritime Wira Pawitra (PMWP) yang merupakan perusahaan pelayaran nasional memberlakukan WFH sejak 16 Maret 2020 guna memerangi Covid-19. Awalnya, manajemen menerapkan dua shift dari setiap departemen dalam perusahaan yang bergantian masuk kantor sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.**

“Kemudian, mengikuti keputusan Pemprov DKI terkait WFH dan PSBB, seluruh karyawan bekerja dari rumah secara waktu penuh,” kata Dian A.

Imirsyah GM Operation/DPA PT PMWP kepada INSA News di Jakarta.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat membantu perusahaan dalam melakukan koordinasi ditengah pandemi Covid-19. Seperti kegiatan operasional kapal dan kru kapal dilakukan secara “remote” dengan menggunakan komunikasi via Whatsapp (WA), email, dan video conferencing menggunakan aplikasi Skype dan Zoom.

“Pertemuan dengan pihak klien pun juga dilakukan secara ‘jarak jauh’ menggunakan Skype, Zoom dan Microsoft Teams,” ungkapnya.

Diakui Dian, suasana bekerja di rumah awalnya sangat berat bagi seluruh karyawan karena menjadi tidak fleksibel. Namun, memahami kondisi yang ada serta demi kesehatan serta keselamatan karyawan dan keluarga masing-masing, akhirnya kegiatan WFH bisa disesuaikan.

Menurut Dian, ada hal positif yang dapat dirasakan para karyawan melalui WFH. Misalnya, bekerja dan berada dekat keluarga 24 jam setiap hari. Sehingga pekerjaan dilakukan sambil membantu anak yang juga melakukan kegiatan sekolah dari rumah, juga urusan rumah tangga seperti memasak, dan merapikan rumah.

“Untuk menjaga kondisi fisik, pastinya karyawan juga melakukan kegiatan olah raga yang secukupnya disekitar area rumah seperti jalan pagi, jogging, yoga, senam dan bersepeda. Tentunya hal ini tidak dipaksakan secara berlebihan mengingat potensi bahaya terpaparnya coronavirus di sekitar kita,” ujarnya.

Kemudian kendala lainnya yang dihadapi perusahaan pelayaran saat WFH, lanjut Dian, adalah terhambat untuk melakukan penggantian Sertifikat Kapal, pengiriman Logistik ke lokasi dan perbaikan kecil (repair) dan besar (docking) karena pembatasan yang dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah.

“Kita berharap pemerintah dapat memberikan keringanan perizinan dan stimulus untuk sektor transportasi yang terdampak covid-19,” tandasnya.

Hal yang sama juga dilakukan PT Mitra Samudra Sejati (MSS) yang menerapkan WFH pada karyawannya. Direktur Utama PT MSS Capt. Zaenal A. Hasibuan mengatakan, perusahaan menerapkan WFH secara bertahap sejak adanya imbauan dari pemerintah.

“Awalnya untuk karyawan yang bekerja menggunakan kendaraan umum kami berlakukan WFH sejak akhir Februari. Lalu dilanjut dengan WFH untuk seluruh karyawan di Jabodetabek,” ujarnya.

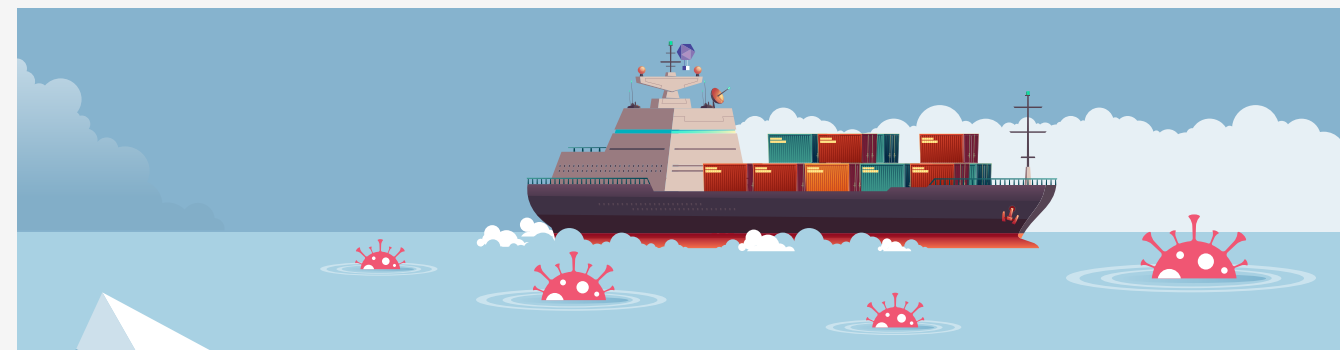
para pelaut menjalankan karantina sebelum naik ke kapal.

“Hal ini memengaruhi jadwal yang sudah dijalankan bertahun-tahun,” bebarnya. Tak hanya itu, saat kapal melakukan docking juga menjadi kendala yang perlu disikapi.

Sebab, kapal belum bisa dilayani dikarenakan terbatasnya para pekerja di lapangan akibat PSBB guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini menyebabkan jadwal operasi kapal berubah dan membengkaknya biaya operasional.

“Saat sebelum memulangkan ABK di kapal tersebut, tiba-tiba berlaku larangan penerbangan dan PSBB di Jawa Timur, maka berantakan lagi semua rencana yang kesemuanya berimbas pada penambahan biaya operasi kapal,” ungkapnya.

Lalu, lanjut Capt. Zaenal, kapal-kapal yang beroperasi di sektor migas juga terkena imbas Covid-19 karena banyak klien yang memberlakukan WFH sehingga urusan



Capt. Zaenal menyebutkan perusahaannya ada di Jakarta dan juga Balikpapan sehingga kerja secara jarak jauh sudah biasa dilakukan perusahaan.

“Kami sebenarnya terbiasa bekerja jarak jauh karena dalam sehari-harinya juga saya sendiri banyak mengerjakan pekerjaan yang mengharuskan saya meninggalkan kantor,” imbuhnya.

Soal kendala yang dihadapi, dikatakan Capt. Zaenal, adalah mengenai rotasi pelaut. Pasalnya, kapal-kapal yang dioperasikan banyak beroperasi di area minyak dan gas (migas) dan Terminal Khusus (Tersus) yang mengharuskan

pembayaran menjadi terhambat. Disisi lain sampai saat ini tidak terlihat adanya kelonggaran dari perbankan dalam menyikapi keadaan tersebut, artinya saat terlambat membayar bank tetap memberi peringatan.

**“Industri jelas terdampak, tapi seperti biasa yang qualified akan survive apakah itu perusahaan kecil atau besar, semua tergantung strategi dan kemampuan beradaptasi,” pungkasnya. (\*)**

# BUTUH RP 1.600 T HADAPI COVID-19



Di awal tahun ini, dunia dikagetkan masif dan fatalnya dampak sebaran virus corona Covid-19. Sudah lebih dari 200 negara terinfeksi. Penderitanya sudah mencapai jutaan orang, dan ratusan ribu lebih orang meninggal dunia. Perang dagang Tiongkok dan Amerika, masif dan fatalnya dampak sebaran virus Covid-19 dan merosotnya harga minyak dunia adalah tiga persoalan yang terjadi bersamaan.

“Kita seperti tengah dikepung tiga tantangan besar, yang tidak main-main beratnya. Tentunya, cara menyelamatkan roda ekonomi juga tidak bisa setengah-setengah,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto.

Carmelita mengatakan, pemerintah memang sudah mengeluarkan paket kebijakan Rp405,1 triliun disiapkan untuk selamatkan ekonomi nasional dari infeksi virus Covid-19 ini. Pembagiannya juga merata untuk tambahan anggaran kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi dan insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, anggaran yang dikeluarkan memang masih relatif lebih kecil ketimbang kebutuhan nasional. Kadin Indonesia misalnya, memiliki hitungan anggaran yang dibutuhkan empat kali lipat lebih besar dari itu,” ujarnya.

**“Setidaknya dibutuhkan Rp1,600 triliun untuk enam bulan kedepan. Pembagiannya direncanakan seperti ini; Rp600 triliun untuk pendapatan tenaga kerja (gaji), Rp400 triliun untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan sosial, Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (UMKM), dan Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (industri padat karya dan strategis),” jelasnya.**

Dengan anggaran sebesar itu, menurut Carmelita, setidaknya akan manage ekspektasi masyarakat dan pasar terhadap pemerintah: bahwa pemerintah memiliki kapasitas likuiditas yang dibutuhkan. Selain itu, anggaran yang besar ini memastikan adanya solusi untuk permasalahan kesehatan.

Dikatakan Carmelita, anggaran pemerintah yang lebih besar diharapkan akan membuat sektor transportasi nasional sebagai industri strategis mendapat porsi bantuan, yang cukup untuk sekedar bisa bertahan.

Carmelita mengungkapkan omset perusahaan transportasi merosot hingga lebih dari setengahnya dan terganggunya cash flow perusahaan. Hal ini terjadi pada seluruh moda transportasi, baik darat, udara dan laut.

Moda angkutan jalan misalnya, penurunan angkutan penumpang mencapai 75%-100% pada semua moda. Organda mencatat, penurunan omset terjadi baik moda angkutan antar kota, maupun moda angkutan perkotaan non PSO.

Pada angkutan laut, kinerja per Maret 2020 mengalami penurunan sekitar 15%. Penurunan kinerja ini diperkirakan akan semakin parah beberapa bulan kedepan akibat penurunan distribusi. Penurunan kinerja yang sama juga terjadi pada angkutan udara.

“Stimulus untuk sektor transportasi ibarat memulihkan tenaga dan daya tahan tubuh sebuah negara, mengingat transportasi merupakan tulang punggung kegiatan logistik nasional. Bantuan terhadap transportasi harus menyeluruh. Pada setiap aspek bisnis transportasi. Mulai dari stimulus sisi fiskal-moneter,” tuturnya.

Di sisi fiskal, lanjut Carmelita, misalnya pembebasan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan penundaan pembayaran Pajak PPH 21 dan 23. Sisi moneter, relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kepada kreditur, dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban pokok hutang dan/atau bunga selama 6 bulan kedepan terhitung sejak April 2020 dan diskon suku bunga pinjaman.

Lain itu, dibutuhkan diskon-diskon biaya kepelabuhanan dan kebandarudaraan dan keringanan persyaratan teknis, seperti dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan crewing selama sertifikat itu bisa ditunda dan tidak membahayakan keselamatan. Yang tidak kalah penting adalah bantuan langsung kepada para sopir moda transportasi jalan.

Dijelaskan Carmelita, stimulus bagi sektor transportasi nasional perlu segera direalisasikan. Mengingat ketahanan bisnis sektor ini sangat rentan dari gejolak. Jika kondisi ini masih bekepanjangan dan iklim bisnis belum dapat recovery setahun kedepan, maka akan banyak pelaku usaha transportasi yang akan gulung tikar.

Menurut Carmelita, bantuan bagi sektor transportasi juga tidak boleh diartikan semata-

mata menyelamatkan perusahaan, tapi juga hajat hidup pekerja yang hidup dari sektor ini. Jutaan orang terancam sumber nafkahnya, baik di moda transportasi darat, laut dan udara jika perusahaan mereka kolaps.

Lebih dari itu, cukup atau tidaknya besaran anggaran yang disiapkan akan sangat bergantung efektifitas penggunaannya. Apalagi pandemi Covid-19 ini dampaknya sangat luas, cepat dan tidak terduga sebelumnya.

Agar anggaran ini efektif, harus terciptanya koordinasi kebijakan yang apik untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan inklusif.

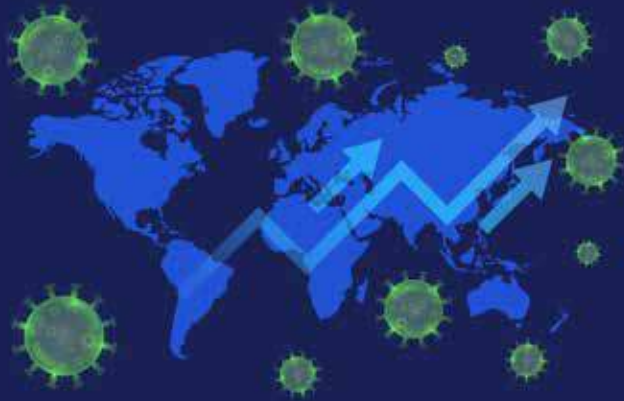
Sinkronisasi kebijakan dari seluruh stakeholder merupakan kunci efektifitas anggaran yang disiapkan. Pemerintah pusat dan daerah harus harus segendang sepenarian. Begitu juga dukungan instansi dan lembaga teknis, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pandemi virus corona Covid-19 ini sangat masif sebarannya, maka masukan para pelaku usaha ini perlu dipertimbangkan. Kebijakan yang tidak setengah-setengah termasuk dalam penyiapan anggaran yang besar perlu dieksekusi segera.

**Hitungan kebutuhan anggaran Rp1,600 merupakan angka ideal, jika alokasinya tepat, khususnya ketepatan memberikan bantuan bagi para pekerja informal dan pelaku UMKM di setiap daerah yang paling rentan dalam situasi ini.**

Sehingga kebijakan apapun yang diambil, misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dapat total berjalan dengan kondusif, mengingat masyarakat terdampak telah terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui bantuan pemerintah.

“Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil kebijakan merupakan kunci untuk menekan pandemi Covid-19 ini. Sebab kita tidak punya banyak waktu dan tidak boleh salah langkah hadapi pandemi ini,” pungkasnya. (\*)



## PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL DI 2020 TERTAHAN COVID-19

**Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pemulihan ekonomi global tertahan akibat menyebarnya Corona Virus Disease 19 (Covid-19) ke berbagai negara. Bahkan penyebaran Covid-19 ini berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah dari pertumbuhan 2019.**

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2019 Bank Indonesia menyebutkan pada akhir tahun lalu, indikator-indikator ekonomi sempat menunjukkan optimisme perbaikan perekonomian global pada 2020. Salah satu indikatornya adalah kemajuan kesepakatan dagang tahap pertama AS-Tiongkok pada akhir 2019 juga memberikan optimisme perbaikan kondisi ekonomi global 2020.

Kondisi ini mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di negara maju dan negara berkembang dalam dua bulan terakhir pada 2019, bahkan berlanjut pada Januari 2020. Beberapa indikator dini global seperti indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan juga menunjukkan perbaikan.

Atas kondisi tersebut, BI pada akhir 2019 memprediksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan meningkat menjadi 3,1%.

Apa yang telah diprediksikan tak sesuai harapan. Kemunculan Covid-19 di Wuhan yang kemudian menyebar luas hampir ke seluruh belahan bumi diyakini menekan pemulihan ekonomi global dan domestik.

Penyebaran Covid-19 yang cepat berdampak langsung terhadap perlambatan perekonomian Tiongkok. Data hingga Maret 2020, menunjukkan berbagai indikator dini pasar barang dan komoditas di Tiongkok pasca tahun baru Lunar menurun tajam. Perlambatan aktivitas ekonomi juga tercermin dari penurunan mobilitas di perkotaan, total penumpang angkutan, dan konsumsi harian batu bara oleh penghasil listrik.

Dampak dari Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan turun tajam pada paruh pertama 2020, sebelum kemudian kembali membaik sejalan dengan berbagai respons kebijakan yang ditempuh Pemerintah Tiongkok.

Dengan peran Tiongkok yang besar dalam perekonomian global yang mencapai 16% dari PDB dunia, dan proporsi sebesar 11% dari total perdagangan dunia, berbagai perkembangan ini diperkirakan akan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global.

Bank Indonesia, pada Februari 2020, menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 dari 3,1% menjadi 3,0%.

“Penyebaran COVID-19 yang meluas berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah dari pertumbuhan 2019 melalui beberapa jalur,” tulisnya dalam buku LPI 2019, Bank Indonesia yang dirilis 30 Maret 2020.

Dampak pandemik Covid-19 menghambat aktivitas ekonomi global tersebut terutama terjadi melalui beberapa sektor, yakni jalur pariwisata, perdagangan dan investasi. Perlambatan aktivitas ekonomi juga disebabkan oleh strategi penanganan Covid-19 di berbagai negara yang berdampak berupa penutupan akses beberapa kota atau bahkan seluruh negara (lockdown).

Penyebaran Covid-19 yang makin meluas ke negara-negara di luar Tiongkok menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi global yang lebih besar dari prakiraan sebelumnya. Pembatasan kunjungan pekerja atau wisatawan yang berasal dari negara terdampak, mengakibatkan penurunan kinerja pariwisata secara global.

Aktivitas ekonomi yang terbatas akibat Covid-19, terutama pada negara mitra dagang, juga menghambat permintaan atas produk domestik dan menurunkan kinerja ekspor. Pembatasan kunjungan pekerja yang berasal dari negara terdampak dapat menurunkan realisasi investasi akibat terhentinya pengembangan industri baru yang membutuhkan tenaga kerja asing.

Perkembangan yang kurang menguntungkan ini pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan

ekonomi dunia melalui permintaan, penawaran, dan juga keyakinan pelaku ekonomi. Dengan dinamika yang berubah cepat ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2020 dapat menjadi lebih rendah lagi menjadi 2,5% disertai dengan risiko ke bawah yang tetap besar.

Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tersebut meningkatkan kembali ketidakpastian pasar keuangan global. Data sampai pertengahan Maret 2020 menunjukkan Covid-19 memicu penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman.

Satu sisi, harga saham di berbagai negara turun tajam, termasuk di negara maju, sementara imbal hasil obligasi negara berkembang juga meningkat tajam. Namun di sisi lain, investor mengalihkan likuiditasnya ke safe haven assets seperti surat berharga AS yang mendorong imbal hasil obligasi surat berharga negara AS (US Treasury Bond) menurun tajam, harga emas meningkat pesat, dan indeks dolar (DXY) terapresiasi.

Berbagai perkembangan ini pada akhirnya menekan mata uang dunia dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Ke depan, dampak Covid-19 perlu terus dicermati mengingat sampai dengan laporan ini disusun, penyebaran Covid-19 terus berlangsung sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam, termasuk potensi dampaknya ke perekonomian Indonesia. (\*)



# DUNIA PELAYARAN

## INSA KELUHKAN MASIH MARAKNYA PENANGKAPAN KAPAL DI LAUT

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengeluhkan masih maraknya pemeriksaan dan penangkapan kapal oleh oknum penegakan hukum di laut terhadap kapal nasional.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal swasta nasional masih terjadi oleh oknum penegakan hukum di laut Indonesia, bahkan kian sering terjadi. INSA mencatat, selama sebulan ini sudah terjadi lima kali pemeriksaan dan penangkapan kapal nasional.

Pemeriksaan dan penangkapan kapal di tengah laut kerap dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan alasan yang terkesan mengada-ada.

“Ini kerugian sangat besar yang dialami para pelaku usaha pelayaran nasional karena meliputi kerugian materi, bahan bakar dan waktu, serta mandeknya pasokan logistik antar pulau di Indonesia” ujarnya, Senin (11/05/2020).

Carmelita menuturkan, kapal-kapal yang diperiksa dan ditangkap ini, merupakan kapal-kapal pengangkut logistik dan bahan pokok ke daerah-daerah.

Untuk itu, Carmelita meminta, seharusnya operasional kapal-kapal ini berjalan lancar, sehingga tidak terjadi keterlambatan waktu pengiriman yang bisa mengakibatkan kelangkaan pasokan bahan pokok di daerah-daerah. Terlebih di masa Covid-19 ini, seharusnya seluruh pihak bahu membahu memastikan kelancaran pasokan bahan pokok.

“Di saat Covid-19 seperti ini, pasokan bahan pokok merupakan aspek utama yang harus terpenuhi bagi seluruh masyarakat, tapi kalau kapal pengangkutnya diberhentikan di laut seperti ini bagaimana?”



Menurut Carmelita, kejadian ini bakal terus berulang selama belum terbentuknya badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard.

INSA menaruh perhatian serius atas terbentuknya badan tunggal penegakan hukum di laut dalam beberapa tahun ini. Hal ini bahkan sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan DPP INSA di Istana Kepresidenan akhir tahun lalu.

Selain itu, DPP INSA juga telah melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya Aan Kurnia.

Carmelita menilai terbentuknya badan tunggal penegakan hukum di laut merupakan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan pembentukannya sudah sangat mendesak.

“Untuk meningkatkan perekonomian nasional, kinerja pelayaran nasional tidak boleh terhambat dalam bentuk apapun dalam menjalankan distribusi logistik nasional. Oleh karena itu kita membutuhkan adanya sea and coast guard seperti yang diamanatkan undang-undang pelayaran.” (\*)

## KEMENHUB MINTA

## PASOKAN LOGISTIK

## LAUT LANCAR

Kementerian Perhubungan mengingatkan kepada seluruh stakeholder untuk mengutamakan keselamatan pelayaran dan kelancaran pasokan logistik melalui jalur laut agar tetap berjalan normal ditengah pandemi Covid-19.

“Meskipun kita dalam kondisi yang cukup sulit karena pandemi corona tetapi kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran serta menjaga terjaminnya kelancaran pasokan logistik di seluruh wilayah tanah air,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dalam siaran pers, Selasa (28/04/2020).

Mengenai kegiatan operasional pelabuhan, Agus menghimbau, agar pelabuhan tetap beroperasi seperti biasa dengan tetap menerapkan SOP Pencegahan penyebaran Covid-19.

Seperti di Pelabuhan Batang, sambung Agus, agar tetap menindaklanjuti penerbitan Pas Kecil bagi kapal tradisional di wilayah kerja Pelabuhan Batang dan meminta berkoordinasi dengan dinas terkait serta memaksimalkan potensi SDM UPP Batang yang berkompeten untuk memproses Penerbitan Pas kecil dengan cara jemput bola dan mendirikan gerai pelayanan di wilayah kerja yang dituju.

“Selain itu saya berpesan agar setiap pelabuhan tetap memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi kapal-kapal yang mengangkut bahan pokok dan logistik lainnya, sehingga pasokan logistik melalui transportasi laut tetap terjamin dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu, Agus juga mengingatkan pentingnya jajaran petugas di lapangan agar mensosialisasikan dan melaksanakan sepenuhnya larangan mudik pada Lebaran tahun 1441 H / 2020 guna mencegah serta memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Menurut Agus, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 telah mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020 yang berlaku untuk semua kapal penumpang mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

“Larangan pengoperasian kapal penumpang tersebut diberlakukan bagi kapal yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah propinsi/kabupaten/kecamatan dimana Pemerintah Daerah menerapkan PSBB, dan atau pelayaran antar propinsi/ kabupaten/kecamatan dimana salah satu Pemerintah Daerah Pelabuhan asal/ singgah/ tujuan menerapkan PSBB,” tuturnya.

Agus meminta jajarannya untuk mensosialisasikan dan menyampaikan penerapan PM 25/2020 tersebut kepada masyarakat dengan cara-cara yang persuasif dan menjaga agar suasana di lapangan tetap kondusif.

“Sampaikan penjelasan terkait larangan mudik di Lebaran 2020 yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan cara persuasif, mengedepankan pendekatan kekeluargaan agar kondisi di lapangan tetap terjaga dan kondusif. Saya yakin masyarakat juga memahami kondisi saat ini dan mau bekerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19,” ujarnya.

Pada kunjungan kerja di Pelabuhan Tegal dan Pelabuhan Cirebon selain berkesempatan mengunjungi Posko Terpadu Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang didirikan oleh masing-masing KSOP dan unsur maritim di pelabuhan, Dirjen Hubla juga mengunjungi Gedung VTS Cirebon yang belum lama diresmikan pengoperasiannya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Wismanono mengatakan, guna mendukung pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Pelabuhan pihaknya telah melakukan berbagai langkah-langkah antara lain menutup pintu masuk pelabuhan dari 3 menjadi 1 pintu untuk memudahkan pengawasan, mengecek suhu tubuh tiap orang yang masuk pelabuhan, mewajibkan seluruh orang yang masuk pelabuhan menggunakan masker, menyusun SOP pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 serta melakukan penyemprotan disinfektan secara periodik dua minggu sekali di wilayah pelabuhan dan sekitar pelabuhan. (\*)

## DITENGAH COVID-19, ARUS BARANG BAHAN POKOK MENINGKAT

Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyatakan bahwa kegiatan pelabuhan tetap berjalan normal. Bahkan, beberapa jenis kargo mengalami peningkatan ditengah masa pandemi Covid-19.

Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengatakan, selama masih ada aktivitas pelayaran, maka kegiatan di pelabuhan terus berjalan. Saat ini aktivitas pelayaran lebih didominasi oleh kargo untuk kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan.

“Sampai sekarang masih jalan kargo, karena masih dibutuhkan untuk banyak pengiriman, misalnya row material untuk buat apa saja, seperti sabun, masker dan bahan kebutuhan lainnya. Bahkan ada pertumbuhan kargo, misalnya bahan baku membuat masker,” kata Aulia di acara Indonesia Maritime Webinar, Kamis (30/04/2020).

Diakui Aulia, ada beberapa pelabuhan terkena dampak wabah Covid-19, terutama pelabuhan yang melayani bongkar muat semen dan kargo untuk pembangunan infrastruktur dan internasional mengalami pengurangan.

“Pelabuhan tetap jalan, tapi kargo yang turun khususnya kargo semen dan kargo untuk pembangunan infraturktur turun, tapi untuk kargo kebutuhan sehari-hari seperti makanan itu malah tumbuh di pelabuhan,” tuturnya.

Senada dengan ABUPI, PT Pelayaran Indonesia III (Persero) mencatat terjadinya peningkatan arus kapal dan petikemas di 43 pelabuhan yang dikelolanya ditengah pandemi Covid-19 ini.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan, hingga April 2020 arus petikemas di 43 pelabuhan yang dikelola perseroannya tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,6 juta Twenty Foot Equivalent Units (TEUs) jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara untuk arus kapal, tercatat naik 3% atau 94,7 juta GT dibanding tahun lalu.



“Terjaganya kinerja positif jasa kepelabuhanan ini berkat komitmen Pelindo III bersama para pengusaha dalam upaya menjaga logistik,” kata Doso dalam keterangan resminya, Minggu (3/5/2020).

Pelindo III, sambung Doso, juga terus menjaga layanan operasional dengan tetap beroperasi selama 24 jam dalam seminggu sebagai komitmen menjaga kelancaran logistik Indonesia, sehingga pelayanan aktivitas kepelabuhanan tetap terlayani dengan baik.

Menurut Doso, pertumbuhan tersebut terjadi karena beberapa jurus relaksasi dan stimulus yang diberikan Pelindo III kepada pelaku logistik. Hal itu dilakukan agar para pengusaha lebih bergairah untuk menggenjot kegiatan ekspor impor dan domestik.

Sementara itu, dalam upaya memerangi penyebaran Covid-19 di kawasan pelabuhan, Pelindo III bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) telah menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) sesuai protokol kesehatan khusus bagi kapal yang akan masuk ke kawasan pelabuhan dengan pengecekan kesehatan seluruh ABK secara langsung di atas kapal (on board) sebelum masuk ke alur menuju pelabuhan.

Sesuai dengan Surat Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor: SR.03.04/3/3508/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penetapan Status Karantina untuk Kapal atau Pesawat yang Berasal dari Wilayah Terjangkit di Indonesia, Pelindo III memastikan seluruh kapal yang akan sandar dan labuh telah melewati berbagai tahapan pemeriksaan sesuai standar yang berlaku.

“Hingga saat ini, kami bersama KKP telah bekerja sama dalam penanganan Covid-19 di pelabuhan secara ketat dan semua dapat berjalan lancar. Apabila ditemukan ada crew atau ABK yang terindikasi Covid-19, maka kapal tersebut akan ditempatkan di area labuh dan mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19,” pungkasnya. (\*)



## PERJUANGAN MENHUB SEMBUH DARI COVID-19

Pada awal Maret 2020, pemerintah mengonfirmasi kasus pertama dan kasus kedua pasien positif Covid-19 di Indonesia. Virus yang penyebarannya sangat cepat ini pun menjangkiti sejumlah pejabat publik, salah satunya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menhub Budi merupakan kasus ke-76 pasien positif Covid-19 dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Bahkan Menhub Budi sempat tak sadarkan diri selama 14 hari.

Selama Menhub Budi menjalani perawatan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pelaksana tugas Menteri Perhubungan.

Sekitar satu bulan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Menhub Budi untuk pertama kalinya berbincang kembali di depan publik pada 27 April 2020, setelah dinyatakan negatif Covid-19. Pada Selasa (05/05/2020) Menhub Budi kembali bertugas secara penuh.

Menhub sempat berbicara soal pertama kali dinyatakan positif Corona. Ia bercerita tidak ada yang menyangka bahwa dirinya terjangkit Corona, awalnya hanya sakit tifus. Ia pun bercerita sempat 14 hari tidak sadar.

“Jadi saya nggak tahu kalau kena Covid ini, karena datanya itu saya tifoid (tifus) dari laboratoriumnya. Saya masuk lah RSPAD, di tengah itu baru dinyatakan Covid saya nggak tahu malah. Yang jelas saya nggak sadar 14 hari,” kisah Budi Karya dalam video conference, Senin (27/4/2020).

Diakui Menhub Budi, dirinya bisa sembuh dari Corona adalah mukjizat. Dikatakan Menhub, bahwa dirinya terlalu memaksakan fisiknya secara berlebihan dalam bekerja hingga akhirnya tak kuat menahan serangan Corona.



**“Saya mengatakan ini adalah mukjizat bagi saya. Saya memang lakukan kegiatan fisik yang berlebihan sehingga pada saat ada virus terpaksa harus terkena,” kata Menhub.**

Menhub mengatakan, saat pertama kali dinyatakan positif Corona, Presiden Joko Widodo sangat perhatian terhadap keluarganya. Ia menyebut Presiden langsung menguatkannya setelah tahu bahwa dia positif Corona.

“Saya ucapkan terima kasih ke Presiden, saat saya dinyatakan Covid, istri saya ditelepon setengah jam lama sekali dikuatkan. Saya juga sampai rumah jam 8, lalu 8 seperempat (lebih 15 menit) dia sudah telepon, meski cuma telepon ini besar buat keluarga saya,” tutur Menhub Budi.

Menhub Budi juga bercerita saat-saat kesembuhannya, ia menerangkan bahwa dia masuk ke RSPAD Gatot Subroto pada 13 Maret 2020. Lalu dinyatakan boleh pulang dan beristirahat di rumah dari Corona per 31 Maret 2020.

Menurutnya, ruang perawatan pasien Covid-19 sangatlah terbatas sehingga menjadi suatu kehormatan bisa memberikan tempatnya kepada yang lebih membutuhkan.

“Saya berterima kasih ke RSPAD dokter dan semua tim yang berdedikasi. Saya masuk tanggal 13 Maret dan keluar tanggal 31 Maret. Tanggal 31 saya itu sudah sadar dan dinyatakan rapid test negatif,” pungkasnya. (Sumber: detik.com & Harian Kompas)

## PEMERINTAH TERBITKAN PERMENDAG 40/2020

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

**Terbitnya peraturan tersebut upaya pemerintah meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan peran angkutan laut dan asuransi nasional dalam kegiatan ekspor impor.**

Peraturan ini mewajibkan eksportir batubara dan crude palm oil (CPO) serta importir beras dan barang pengadaan pemerintah supaya menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional. Khusus untuk penggunaan angkutan laut nasional, kewajiban tersebut hanya berlaku untuk penggunaan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15.000 deadweight tonnage (dwt).

Seperti diketahui, ketentuan wajib penggunaan angkutan laut dan asuransi nasional sebelumnya telah diatur dalam Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Lalu, mengalami perubahan kedua dengan terbitnya Permendag Nomor 80 Tahun 2018.

Pemberlakuan secara efektif baru dilakukan pada asuransi nasional sedangkan implementasi angkutan laut nasional akan dilakukan tanggal 1 Mei 2020.

“Melalui penyempurnaan Permendag ini, Kementerian Perdagangan berharap peran serta angkutan laut nasional dalam kegiatan ekspor impor akan meningkat, sekaligus mendorong tumbuhnya industri galangan kapal nasional,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto seperti dikutip [www.swa.co.id](http://www.swa.co.id).

Agus menjelaskan, penetapan kebijakan ini masih membuka peluang bagi perusahaan asing, khususnya perusahaan angkutan laut asing, untuk berperan dalam kegiatan ekspor dan impor barang-barang tersebut. Hal ini mengingat kewajiban penggunaan angkutan laut nasional hanya diberlakukan untuk penggunaan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15.000 dwt.

“Dengan masih dibukanya peran perusahaan angkutan laut asing, maka diharapkan kegiatan ekspor dan impor barang-barang tersebut tetap dapat berjalan lancar,” ungkap Mendag.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, perusahaan angkutan laut nasional yang menggunakan angkutan laut dengan kapasitas sampai dengan 15.000 dwt wajib menyampaikan data penggunaan angkutan laut tersebut kepada Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui INATRADE, sebelum angkutan laut tersebut sandar di pelabuhan Indonesia.

Eksportir dan importir diwajibkan melaporkan realisasi ekspor-impor melalui INATRADE, dan juga wajib mencantumkan cost dan freight serta data polis asuransi dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hal ini dilakukan tidak hanya untuk penyempurnaan data logistik ekspor dan impor, namun juga sebagai indikator penilaian efektivitas dari penerapan kebijakan ini.

Permendag Nomor 40 Tahun 2020 selain mengatur angkutan laut nasional juga terkait dengan asuransi nasional telah lebih dulu dilaksanakan pada 1 Februari 2019. Kegiatan asuransi yang dimaksud mencakup ekspor untuk dua produk ekspor, yakni batubara dan sawit (CPO), serta impor untuk beras dan pengadaan barang pemerintah. (\*)



## PENGUKUHAN DAN LAYANAN SERTIFIKASI KAPAL DIPERPANJANG

Guna memastikan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terkait dalam kegiatan sertifikasi kapal, serta untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Kementerian Perhubungan melakukan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia khususnya di masa pandemi Covid 19.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku/Pengukuhan Sertifikat Statutori/Re-Inspection Life Saving Appliance (LSA) serta Re-Inspection Fire Fighting Appliance (FFA) Bagi Kapal Berbendera Indonesia Akibat Status Keadaan Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menjelaskan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia dalam surat edaran tersebut mencakup beberapa hal, diantaranya kegiatan survey dan sertifikasi statutori, perpanjangan sertifikasi statutori, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan survey pembaharuan/special survey/survey tahunan/audit pembaharuan/audit antara, kegiatan Re-Inspection LSA, dan kegiatan Re-Inspection FFA.

“Berkenaan dengan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia akan dilakukan beberapa penyesuaian layanan, salah satunya untuk Sertifikasi Statutori yang habis masa berlakunya sebelum 29 Mei 2020, dapat diberikan perpanjangan (postponement of bottom inspection) tidak lebih tiga bulan dari berakhirnya masa berlaku sertifikat dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan,” ujar Capt. Sudiono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/4).

Selanjutnya, untuk Sertifikat Statutori yang jatuh tempo maksimum time window, Ia mengatakan dapat dilakukan pengukuhan (endorsement) sertifikat pada survey/audit tahunan (annual survey) termasuk survey/audit antara sebelum 29 Mei 2020 dapat diberikan perpanjangan tidak lebih dari tiga bulan dari jangka waktu maksimal pengukuhan dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

“Perpanjangan atau pengukuhan untuk kegiatan intermediate survey, renewal/special survey dan perpanjangan karena sertifikat statutori berakhir tersebut dapat dilaksanakan sepanjang kondisi galangan tidak dapat melaksanakan kegiatan docking disebabkan status keadaan tertentu darurat Covid-19 dengan dibuktikan berupa surat pernyataan dari galangan atau dokumen dari Syahbandar setempat yang menyatakan lokasi kapal berada di negara atau daerah terdampak Covid-19 sehingga tidak dapat diakses,” tuturnya.

Selain itu, dalam kondisi saat ini, Capt. Sudiono menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan.

Dispensasi, perpanjangan ataupun pengukuhan Sertifikat Statutori dimana Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK)/ Marine Inspector/Recognize Organization (RO) tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan kapal berada di negara atau daerah terdampak Covid-19, maka pemilik kapal/perusahaan/ship management wajib melampirkan dokumen kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau RO yang disampaikan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

Adapun dokumen yang wajib dilampirkan antara lain data kapal, alasan spesifik keperluan perpanjangan/dispensasi/pengukuhan, daftar lima pelabuhan terakhir, dan surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan kapal dalam kondisi baik untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya.

Capt. Sudiono menambahkan, surat edaran tersebut juga mengatur untuk sertifikat statutori yang jatuh tempo maksimum time window dan untuk sertifikat/dokumen Re-Inspection LSA dan Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Usaha tidak lebih dari tiga bulan.

Sebagai informasi, pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tersebut dilaksanakan oleh UPT yang menjalankan tugas dan fungsi kesyahbandaran, RO yang melaksanakan kegiatan survey dan sertifikat statutori dan Badan Usaha yang melaksanakan survey Re-Inspection LSA serta Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia.

Capt. Sudiono menambahkan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tidak berlaku terhadap Penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak secara curah/dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar kapal (CLC/CLC Bunker), dan penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal). (\*)

## BAKAMLA PERKETAT PENGAMANAN JALUR MASUK PELABUHAN TIKUS

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memperketat pengamanan pelabuhan-pelabuhan tikus (pelabuhan tidak resmi) yang menjadi jalur pelintasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Jika ditemukan TKI menggunakan jalur tikus, akan diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Batam untuk pemeriksaan kesehatan dan karantina.

“Sejauh ini masih ada TKI yang menggunakan jalur itu, khususnya di wilayah pantai timur Sumatra. Beberapa waktu lalu, TNI-AL mengamankan 20 TKI dari Malaysia. Untuk wilayah Batam, karena jalurnya seperti bottleneck, lebih mudah pengawasannya dan Bakamla berhubungan baik dengan APMM Malaysia sehingga info sharing berjalan baik dan efektif,” kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Aan Kurnia seperti dikutip koran Media Indonesia.

Menurutnya, Bakamla akan bersinergi dengan TNI-AL dan instansi lain ketika mendapatkan informasi atau menemukan TKI masuk wilayah Indonesia menggunakan jalur tikus. Mereka akan diarahkan ke pelabuhan resmi setelah berkoordinasi dengan pihak berwenang di wilayah tersebut. Di sana mereka akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta karantina bagi yang memiliki keluhan pandemi virus korona.

“TKI yang menggunakan jalur tikus sudah dilaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah dan sudah dilaksanakan oleh forkopimda setempat,” tegasnya.

Tugas itu, kata dia, sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi kepada Bakamla agar mengoordinasi semua kapal patroli yang ada di laut untuk memperkuat atau mengawasi daerah-daerah yang rawan, yaitu jalur laut ilegal.

“Sampai saat ini memang telah terjadi penurunan pelintasan dari Malaysia ke Kepulauan Riau. Dari yang biasanya ribuan, saat ini hanya sekitar 500-an TKI dan jumlah seluruhnya sejak Maret lalu sudah mencapai 37.769 orang,” imbuhnya.

Penyekatan TKI dari Malaysia terus dilakukan Bakamla, khususnya di wilayah Batam. Hal itu dilakukan karena wilayah tersebut masih memiliki sejumlah jalur tikus yang digunakan, apalagi setelah ada pembatasan transportasi laut dari Malaysia.

## Pelabuhan Resmi

Saat ini pemerintah telah menentukan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Batam sebagai pelabuhan resmi yang diizinkan untuk menerima TKI dari Malaysia. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses screening kesehatan dan menjamin pengendalian pandemi virus korona.

Bakamla melalui zona maritim barat terus melaksanakan penyekatan di beberapa simpul masuk menuju pelabuhan tikus dengan menyiagakan dua kapal patroli jenis rigid hulled infl atable boats (RHIB) dan satu katamaran.

Guna mengefektifkan operasi lintas batas yang digelar Bakamla untuk penyekatan tersebut, zona maritim barat melaksanakan koordinasi yang ketat dengan pihak APMM Malaysia.

Kepala Zona Maritim Barat Laksma Bakamla Eko Murwanto mengatakan bahwa jajarannya memperketat pengawasan di simpul-simpul pintu masuk ke pelabuhan tikus setelah menerima informasi intelijen dari APMM Malaysia mengenai gerakan TKI ke Batam.

“Setiap saya menerima informasi setelah berkoordinasi dengan pejabat APMM Malaysia Laksma Aminuddin, kami segera meningkatkan kesiagaan. Namun, saat ini kami belum menemukan kontak tersebut pada sektor sekak yang kami tentukan. Ada kemungkinan speedboat mengarah ke Tanjung Pinang dan sudah kami teruskan informasi itu ke satuan samping di wilayah tersebut untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Bakamla akan terus meningkatkan kehadiran di laut dengan menggerakkan kapal patroli untuk penyekatan di perairan Tanjung Balai Asahan dan Dumai. (\*)



## DISPENSASI PERIZINAN DI BIDANG KEPELABUHANAN

Menyusul ditetapkannya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah memberikan dispensasi atau keringanan terhadap beberapa proses perizinan, termasuk di bidang kepelabuhanan selama masa status keadaan darurat bencana wabah Covid-19.

**Pemberian dispensasi dilakukan oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap perizinan/persetujuan bidang kepelabuhanan di antaranya Pekerjaan Pengerukan, Pekerjaan Reklamasi, Terminal Khusus (TERSUS), Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan pengoperasian pemanfaatan garis pantai serta evaluasi Sarana Bantu dan Prasarana pemanduan kapal.**

Direktur Kepelabuhanan Subagiyo mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 18 Tahun 2020 dan pelaksanaan ketentuan dispensasi diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan tanggal 17 April 2020.

Pertama, untuk Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Februari 2020 s.d. 29 Mei 2020, dan perlu melakukan perpanjangan tetap dapat melakukan kegiatan kerja keruk sesuai dengan yang direncanakan dengan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat

“Terhadap permohonan Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi (SIUPR), Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi (PK2R) dan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (PK3R) yang telah diajukan dan telah diproses namun belum terbit persetujuannya, agar menunggu terbitnya persetujuan tersebut dari Menteri Perhubungan,” kata Subagiyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (19/04/2020).

Selanjutnya, terhadap Izin Pengoperasian Tersus/TUKS dan Izin Penggunaan Tersus/TUKS Sementara Untuk Melayani Kepentingan Umum serta Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai yang habis masa berlakunya

pada tanggal 29 Februari 2020 s.d. 29 Mei 2020, dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis fasilitas, ketertiban dan keselamatan pelayaran serta aspek kelestarian lingkungan.

“Namun jika perizinan tersebut telah diajukan tapi belum terbit izinnya, agar menunggu terbitnya Perizinan Tersus/TUKS dan Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai tersebut,” katanya.

Dispensasi juga diberikan terhadap Evaluasi Pelimpahan Kembali, Endorsement Sertifikat Pandu, Verifikasi Sarana Bantu Dan Prasarana Pemanduan Kapal.

“Terhadap evaluasi pelimpahan kembali kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Pengelola Terminal Khusus yang harus dilaksanakan evaluasinya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dapat melakukan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal atas persetujuan Pengawas Pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan yang telah dilaksanakan,” tuturnya.

Begitupun terhadap endorsement sertifikat pandu yang habis masa berlakunya pada tanggal 29 Februari 2020 s.d. 29 Mei 2020, para pandu dapat melaksanakan pelayanan pemanduan kapal atas persetujuan Pengawas Pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil medical check up yang masih berlaku.

“Sedangkan untuk permohonan baru terhadap perizinan/persetujuan tersebut dapat diajukan secara online melalui email ditpelpeng@dephub.go.id,” terangnya. Lebih lanjut pihaknya menegaskan, pelaksanaan dispensasi ini tetap memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 8 Tahun 2020 tentang Langkah Siaga Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia serta terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan tetap dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan.

“Kami telah menginstruksikan kepada para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemilik Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi, BUP, Pengelola Tersus/TUKS, Pemanfaatan Garis Pantai, dan Pengelola Pemantauan di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya. (\*)

## PERMENHUB PENGENDALIAN TRANSPORTASI MUDIK DITERBITKAN

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Permenhub tersebut telah ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Adita menjelaskan, pengaturan tersebut berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran 2020. Adita bilang, pengaturan transportasi ini, berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, khususnya untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang.

Misalnya: angkutan umum seperti: bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kapal laut. Serta kendaraan pribadi baik itu mobil maupun sepeda motor.

Akan tetapi, ada beberapa angkutan yang dikecualikan dari pelarangan seperti, Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia; kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; dan mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang.

“Untuk sektor transportasi lainnya seperti di udara, laut, penyeberangan dan perkeretaapian juga diatur di dalam Permenhub terkait jenis angkutan yang dikecualikan dilakukan pelarangan,” katanya.

Adita mengungkapkan, larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah seperti: wilayah PSBB, Zona Merah Penyebaran Covid-19, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti misalnya, Jabodetabek.

“Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut



dengan check point yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos-pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Pori,” tuturnya.

**Dalam Permenhub tersebut diatur juga pemberian sanksi secara bertahap mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik.**

Dengan tahapan, pada 24 April-7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan diarahkan untuk kembali (putar balik) ke asal perjalanan dan pada 7 Mei-31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Larangan mulai berlaku pada 24 April s.d 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyeberangan, 24 April-15 Juni 2020 untuk kereta api, 24 April-8 Juni untuk kapal laut, dan 24 April-1 Juni 2020 untuk angkutan udara.

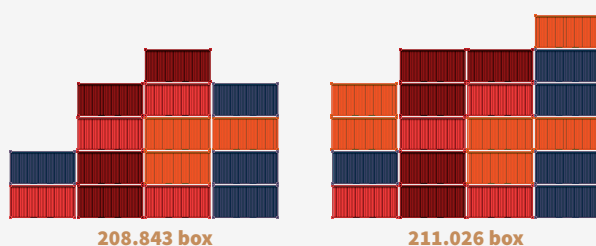
“Terkait kebijakan pengembalian tiket (refund) bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket pada tanggal-tanggal tersebut, juga telah diatur di dalam Permenhub bahwa badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain refund tiket, juga diberikan pilihan untuk melakukan re-schedule, dan re-route,” pungkasnya. (\*)

## TRIWULAN I, KINERJA TPK BELAWAN MENINGKAT

Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 optimis terhadap kinerja bongkar muat barang yang menunjukkan peningkatan trafik. Arus kunjungan kapal selama Januari-Maret 2020 sebanyak 218 call yang meliputi terminal internasional dan domestik.

Periode Triwulan I-2019

Periode Triwulan I-2020



Sementara itu, bongkar muat barang petikemas selama periode Triwulan I-2020 sebanyak 211.026 box. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 yakni 208.843 box yang merupakan jumlah bongkar muat petikemas di dua cabang: Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB). Realisasi bongkar muat tersebut setara dengan 267.456 TEUs yang tumbuh meningkat dibandingkan Triwulan I-2019 yang sebesar 265.975 TEUs.

General Manager TPK Belawan Indra Pamulihan mengatakan, peningkatan arus bongkar muat di TPK Belawan untuk Triwulan I-2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif. TPK Belawan mencatatkan realisasi bongkar muat barang selama periode Triwulan I sebesar 3.600.256 ton di terminal

internasional dan domestik yang naik 0,36% dibandingkan dengan realisasi Triwulan I-2019 yang sebesar 3.473.627 ton.

Selama periode Januari-Maret 2020, lanjut Indra, trafik bongkar muat di TPK Belawan cenderung mengalami peningkatan untuk di terminal domestik, sedangkan untuk terminal internasional sedikit menurun di Februari namun mulai meningkat kembali di Maret.

“Sehingga, kami optimis ke depannya trafik bongkar muat petikemas di TPK Belawan akan menunjukkan tren positif,” kata Indra dalam siaran pers, Sabtu (02/05/2020).

TPK Belawan memiliki dua terminal, yakni terminal A untuk pelayanan internasional dan terminal B untuk pelayanan domestik. Selama triwulan I ini, komoditi unggulan di terminal domestik meliputi alat tulis kantor, bahan makanan, besi, dan tepung. Sedangkan untuk komoditi impor unggulan meliputi pupuk, chemical, makanan ternak serta komoditi ekspor unggulannya yakni palm oil, chemical, dan karet.

Kinerja operasional TPK Belawan juga mengalami peningkatan, untuk rata-rata produktivitas terminal internasional selama triwulan I-2020 sebesar 51,30 B/S/H (Box/Ship/Hour) dan terminal domestik sebesar 46,97 B/S/H. Angka tersebut di atas standar kinerja bongkar muat peti kemas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan yakni 32 B/S/H.

Sejak Januari 2020, manajemen Pelindo 1 melakukan penggabungan manajemen dua terminal peti kemasnya yakni BICT dan TPKDB menjadi TPK Belawan yang menjadi salah satu upaya dan strategi korporasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, handal, dan efisien untuk memenuhi customer satisfaction pengguna jasa.

VP Public Relations Pelindo 1 Fiona Sari Utami menambahkan bahwa selama masa pandemi ini, kinerja di seluruh cabang pelabuhan untuk layanan bongkar muat petikemas dan kargo yang dikelola Pelindo 1 cenderung stabil dan kegiatan ekspor impor masih berjalan dengan lancar, serta Pelindo 1 memastikan layanan operasional pelabuhan tetap berjalan 24 jam. (\*)

## PERCEPATAN PERSIAPAN IMPLEMENTASI TSS SELAT SUNDA DAN LOMBOK

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan persiapan jelang diberlakukannya Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok mulai 1 Juli 2020 mendatang, salah satunya dengan menggelar kegiatan Refresher atau Penyegaran bagi Petugas Operasional dan Operator Stasiun Vessel Traffic System (VTS) Merak dan Benoa yang diselenggarakan secara online melalui video conference.

Direktur Kenavigasian Hengky Angkasawan mengatakan, kegiatan Refresher Online ini diselenggarakan untuk mengetahui progress kesiapan dari operator VTS Merak dan Benoa dalam rangka implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, serta untuk menyampaikan update ketentuan-ketentuan Internasional yang terkait.

“Seperti kita ketahui, berdasarkan hasil Sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 telah disepakati bahwa TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok akan diimplementasikan tanggal 1 Juli 2020 mendatang. Untuk itu tentunya diperlukan kesiapan sumber daya manusia selaku operatornya agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” ujar Hengky dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2020).

Menurut Hengky, kegiatan ini perlu dilaksanakan karena dalam melaksanakan pengawasan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, Operator VTS harus mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan sesuai United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS), serta ketentuan lainnya dari International Maritime Organization (IMO) dan International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

Hengky menyampaikan, pelaksanaan kegiatan Refresher secara online ini merupakan bukti bahwa Kementerian Perhubungan tetap melaksanakan percepatan persiapan implementasi TSS meskipun sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini merupakan bukti, bahwa pandemi Covid-19 tidak menghalangi kerja nyata kita melayani masyarakat, dalam hal ini dengan tetap memfasilitasi agar para Operator VTS bisa mendapatkan pengetahuan dan update terkait dengan implementasi TSS di Selat Sunda dan Lombok bulan Juli mendatang,” tukasnya.

Adapun dalam kegiatan Refresher Online ini, perwakilan dari Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan bertindak selaku narasumber untuk menyampaikan materi mengenai ketentuan-ketentuan terkait berdasarkan UNCLOS, Collision Regulation (COLREG) Rule 10 tentang TSS, serta Standard Maritime Communication Phrase (SMCP).

“Para Narasumber akan menyampaikan materi-materi yang merupakan standar pengetahuan yang wajib dimiliki oleh Operator VTS, khususnya di wilayah TSS. Selain itu, seluruh peserta akan diajak untuk mereview bersama Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional VTS serta akan disosialisasikan pula Draft RPM TSS,” pungkasnya. (\*)



## PEMERINTAH IZINKAN SEMUA MODA TRANSPORTASI OPERASI LAGI

Mulai 07 Mei 2020, semua moda transportasi kembali beroperasi. Sebelumnya semua moda transportasi dilarang membawa penumpang sejak 24 April 2020 seiring dengan larangan mudik.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan disediakan untuk para pemudik, tetapi untuk melayani pergerakan orang non mudik.

“Rencananya, operasinya itu mulai besok 7 Mei. Pesawat, segala macam, dengan (mengangkut) orang-orang khusus (saja). Tapi tidak boleh mudik sekali lagi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti dikutip [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), Rabu (6/5/20).

Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan terbitnya aturan baru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Regulasi itu berupa surat edaran yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tertulis dalam aturan tersebut, larangan mudik untuk sektor darat dan penyeberangan berlaku 24 April sampai 31 Mei 2020, untuk kereta api mulai 24 April sampai 15 Juni 2020, untuk kapal laut mulai 24 April hingga 8 Juni, dan untuk angkutan udara mulai 24 April hingga 1 Juni 2020.

Menhub Budi mengatakan, surat edaran ini dibutuhkan untuk memberikan acuan teknis dalam penyelenggaraan transportasi saat terjadi larangan mudik. Surat ini diterbitkan juga mempertimbangkan rekomendasi dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan, udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan,” tuturnya.

Surat edaran dari Kemenhub ini, menurutnya bakal dirilis bersamaan dari kebijakan dari Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“BNPB akan memberikan kriteria, isinya ada kriteria kriteria tertentu. Nanti BNPB bersama Kemenkes bisa menentukan dan itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan kebijakan dibukanya lagi seluruh moda transportasi bukan berarti ada pelonggaran kebijakan larangan mudik. Ia menegaskan larangan mudik tetap berlaku. Larangan operasi transportasi untuk domestik sempat berlaku 27-28 April lalu menyusul kebijakan larangan mudik sebelumnya.

“Mudik akan tegas dilarang, yang akan dibuat aturannya adalah aturan transportasi untuk orang yang bepergian untuk kepentingan khusus, yang akan ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kepentingan khusus itu non mudik,” beber Adita. (\*)

## DIRJEN HUBLA TERBITKAN SE PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI LAUT

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran ini diterbitkan seiring adanya kebijakan yang mengizinkan seluruh moda transportasi beroperasi kembali ditengah masa pandemi Covid-19.

“Ini merupakan petunjuk operasional di lapangan bagi para Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Angkutan Pelayaran serta Usaha Jasa Terkait untuk melaksanakan pembatasan perjalanan orang melalui transportasi laut dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” tulis SE tersebut.

Dalam Surat Edaran tersebut menjelaskan mengenai beberapa petunjuk operasional di sektor transportasi laut. Seperti, petunjuk pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas. Lalu, petunjuk mengenai kapal barang dan kapal angkutan laut khusus diijinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan mengenai Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 dan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kemudian terhadap pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas harus dilakukan pengendalian dan pengawasan.

Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini. (\*)





## DPC INSA SURABAYA PEDULI DAN BERBAGI



# SEPUTAR INSA



Ketua DPC INSA Surabaya Stenven H Lesawengan (kanan) serahkan bantuan melalui TNI



Ketua DPC INSA Surabaya Stenven H Lesawengan bersama staf salurkan bantuan ke RS Universitas Airlangga

Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Surabaya menggelar aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dan Petugas Medis yang menjadi garda terdepan memerangi Covid-19.

Aksi sosial ini dilakukan secara bertahap dengan menyalurkan bantuan berupa bahan pokok dan alat pelindung diri (APD). Pada tahap pertama, 16 April 2020, melalui TNI-AL, DPC INSA Surabaya telah menyalurkan 150 sak beras @5kg, mie instan sebanyak 50 dus, dan 50 APD untuk dikirim ke Indonesia bagian Timur.

Lalu pada tahap kedua, 24 April 2020, melalui RS. Universitas Airlangga, DPC INSA Surabaya menyalurkan dua galon disinfektan, tiga galon dan 10 botol hand sanitizer, sarung tangan medis, lima box masker, 12 carton minuman

vitamin c hydromamma, dan 200 pake APD (baju hazmat, face sheild, boot cover) untuk tenaga medis.

DPC INSA Surabaya terus mengupayakan menyalurkan bantuan guna menolong dan berbagi kepada sesama yang terdampak pandemi covid-19. (\*)





## KELUARGA BESAR DPP INSA

*Mengucapkan Turut Berduka Cita yang mendalam atas wafatnya*

**Bapak Rudi Prastowo**  
**Ketua Bidang Breakbulk**  
**DPC INSA Surabaya**

*semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT, ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan.*  
**Amin**



## DPC INSA SURABAYA BERDUKA

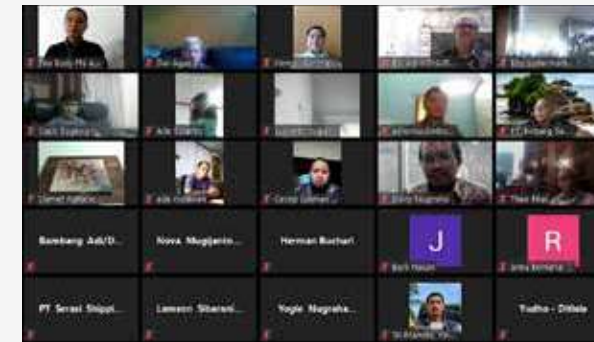
Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Surabaya tengah berduka karena salah satu pengurusnya yakni Ketua Bidang Breakbulk Rudi Prastowo meninggal dunia. Ketua DPC INSA Surabaya Stenven H. Lesawengan mengatakan, beliau menghembuskan nafas terakhir pada Rabu (22/4/2020). Sebelumnya, sempat dirawat di Rumah Sakit (RS) selama 4-5 hari.

Mengenai isu yang beredar penyebab meninggalnya diduga karena terpapar Covid-19, Stenven menjelaskan bahwa sebelumnya Rudi dinyatakan negatif setelah dilakukan rapid test sebanyak dua kali. Saat ini DPC INSA Surabaya masih menunggu hasil dari test swab. "Seperti saya sampaikan bahwa beliau sudah rapid test dua kali itu negatif (Covid-19), hanya berselang 3-4 hari dari hasil test tersebut beliau meninggal dunia, demikian kita masih nunggu secara resmi hasil test swabnya," kata Stenven kepada INSA News.

Stenven menuturkan DPC INSA Surabaya berduka atas kepergian salah satu keluarga besar DPC INSA Surabaya.

Mendapat kabar tersebut, Keluarga Besar Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ketua Bidang Breakbulk DPC INSA Surabaya Rudi Prastowo. (\*)

## SOSIALISASI PERMENDAG NO 40 TAHUN 2020



Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar sosialisasi Permendag No. 40 tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Acara digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, pada Selasa, (28 April 2020).

Acara sosialisasi ini diperuntukkan bagi seluruh anggota INSA untuk mendapatkan penjelasan umum mengenai Permedag No. 40 ini.

Hadir sebagai pembicara Bapak Bambang Adi Winarso Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Johni Marta Direktur Fasilitas Ekspor-Impor Kementerian Perdagangan dan Bapak Wisnu Handoko Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan.

Sementara yang menjadi moderator acara Bapak Darmansyah Tanamas dari DPP INSA. Sedangkan peserta acara tersebut mencapai 103 peserta yang terdiri pelaku usaha pelayaran nasional anggota INSA.

Para anggota INSA juga diimbau untuk selalu berkomunikasi dengan DPP INSA untuk mengikuti kegiatan lainnya. (\*)



# INDONESIA MARITIM WEBINAR



Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto menjadi narasumber di Maritime Webinar "The Impact of the Pandemic on Indonesian Maritime Industry", pada Kamis (30/04/2020), yang diselenggarakan oleh Maps & Globes Specialist dan disponsori oleh beberapa perusahaan terkemuka di industri ini.

Pada kesempatan tersebut, Carmelita memaparkan mengenai "Covid-19 Affected to National Shipping Industry". Isu ini sengaja diangkat mengingat pelayaran nasional merupakan sektor paling terdampak dari pandemi Covid-19.

Dampak itu, dari mulai turunnya volume kargo ekspor impor dan impor, terganggunya cash flow karena naiknya A/R akibat pelanggan terkendala pembayaran jasa, terkendalanya docking kapal, hingga terhambatnya pengurus sertifikat kapal dan kru.

Covid-19 merupakan satu dari beberapa persoalan lain yang dihadapi pelayaran. Selain pandemi ini, pelayaran juga dihadapkan persoalan merosotnya harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar dolar Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Permasalahan-permasalahan ini yang membuat kinerja pelayaran nasional sangat berat sekarang, karena sejumlah beban biaya naik, sedangkan pendapatan cenderung turun. Lain itu, kinerja pelayaran juga dibayang-bayangi pemutusan kontrak kerja di beberapa sektor pelayaran, seperti offshore, tanker, dan khusus.

Untuk itu, DPP INSA telah secara aktif meminta sejumlah stimulus kepada pemerintah dan stakeholder pelayaran, yang diharapkan setidaknya dapat membuat pelayaran dapat bertahan dari hantaman badai permasalahan saat ini.

Selain Carmelita, hadir pula pembicara lainnya seperti Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Eddy K. Logam dan Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial Fatwa.

Webinar ini dihadiri kurang lebih 350 peserta dari dalam dan luar negeri. Antusiasme pemerhati bidang maritim Indonesia memang cukup tinggi pada webinar ini. Hal ini terlihat dari kepadatan calon peserta yang sempat terjadi pada saat registrasi online. (\*)

# CARMELITA TERPILIH

“100 Business Women of The Year”



**Carmelita Hartoto**  
Direktur Utama Andhika Line

Mewarisi usaha yang dirintis ayahnya, Carmelita berhasil menahkodai Andhika Lines hingga kini. Saat ini ada enam jenis jasa yang disediakan Andhika Lines yaitu Kepemilikan Kapal, Operator Kapal, Manajemen Kapal, Agen Kapal, Manajemen Kapal Komersial dan Layanan Logistik Terpadu. Selain itu Carmelita juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk periode 2019-2023



Keberadaan perempuan dalam dunia usaha semakin signifikan. Maka tak heran, makin bertambahnya sosok kaum hawa yang sukses di dunia usaha.

Seperti di bisnis pelayaran, banyak orang bilang bahwa dunia usaha ini mayoritas dikuasai oleh kaum adam. Namun hal ini tak membuat ciut nyali Carmelita Hartoto ketika terjun di bisnis pelayaran, justru ini menjadi penyemangatnya guna mencapai kesuksesan di industri pelayaran nasional

Singkat cerita, Carmelita sukses menahkodai PT Adhika Lines dalam bersaing di industri pelayaran nasional. Tidak hanya sukses dalam berbisnis, Carmelita juga aktif berorganisasi di Perkumpulan Pengusaha Pelayaran Niaga

Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) sebagai Ketua Umum, dan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan.

Dalam berorganisasi, Carmelita tak kenal lelah dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya dan kemajuan industri pelayaran nasional. Atas prestasinya tersebut, Carmelita masuk dalam jajaran "100 Business Woman of The Year" versi majalah SWA Edisi April 2020. Pemilihan "100 Business Women of The Year" berasal dari kalangan profesional, entrepreneur maupun startup dengan menggunakan sejumlah kriteria. (\*)





## DPC INSA DUMAI BAGIKAN 500 PAKET SEMBAKO



Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Dumai menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan 500 paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Dumai, Sabtu (16/05/2020).

Ketua DPC INSA Dumai Herman Buchari mengatakan, kegiatan sosial ini merupakan salah satu bentuk kepedulian INSA Dumai kepada masyarakat pesisir pantai Kota Dumai, dan diharapkan bisa meringankan beban masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

"Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalankan peran serta sosial INSA Dumai terhadap masyarakat sekitar," kata Herman kepada INSA News, Sabtu (16/05/2020).

Herman bilang, DPC INSA Dumai bekerjasama dengan PT Pelindo I Cabang Dumai, dan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dalam menyelenggarakan kegiatan sosial ini. Dua Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tersebut turut memberikan bantuan berupa paket sembako melalui DPC INSA Dumai.

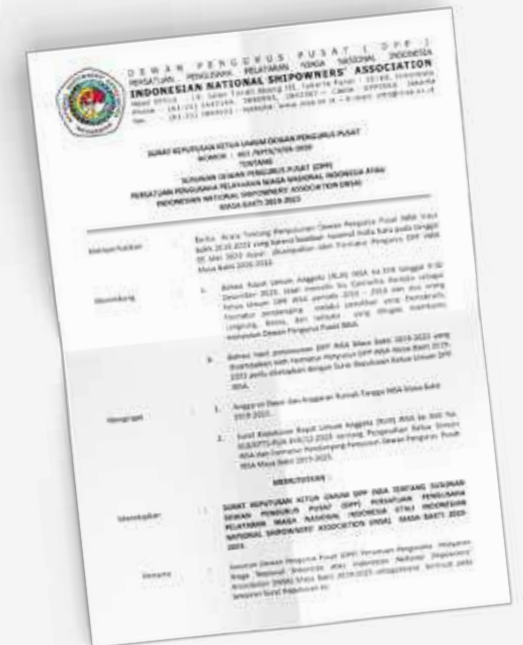
"Terkumpul 500 paket sembako, sudah tersalurkan 300. Sisanya akan kami salurkan pada hari berikutnya. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun," pungkasnya. (\*)

## KEPENGURUSAN DPP INSA 2019-2023 RESMI TERBENTUK

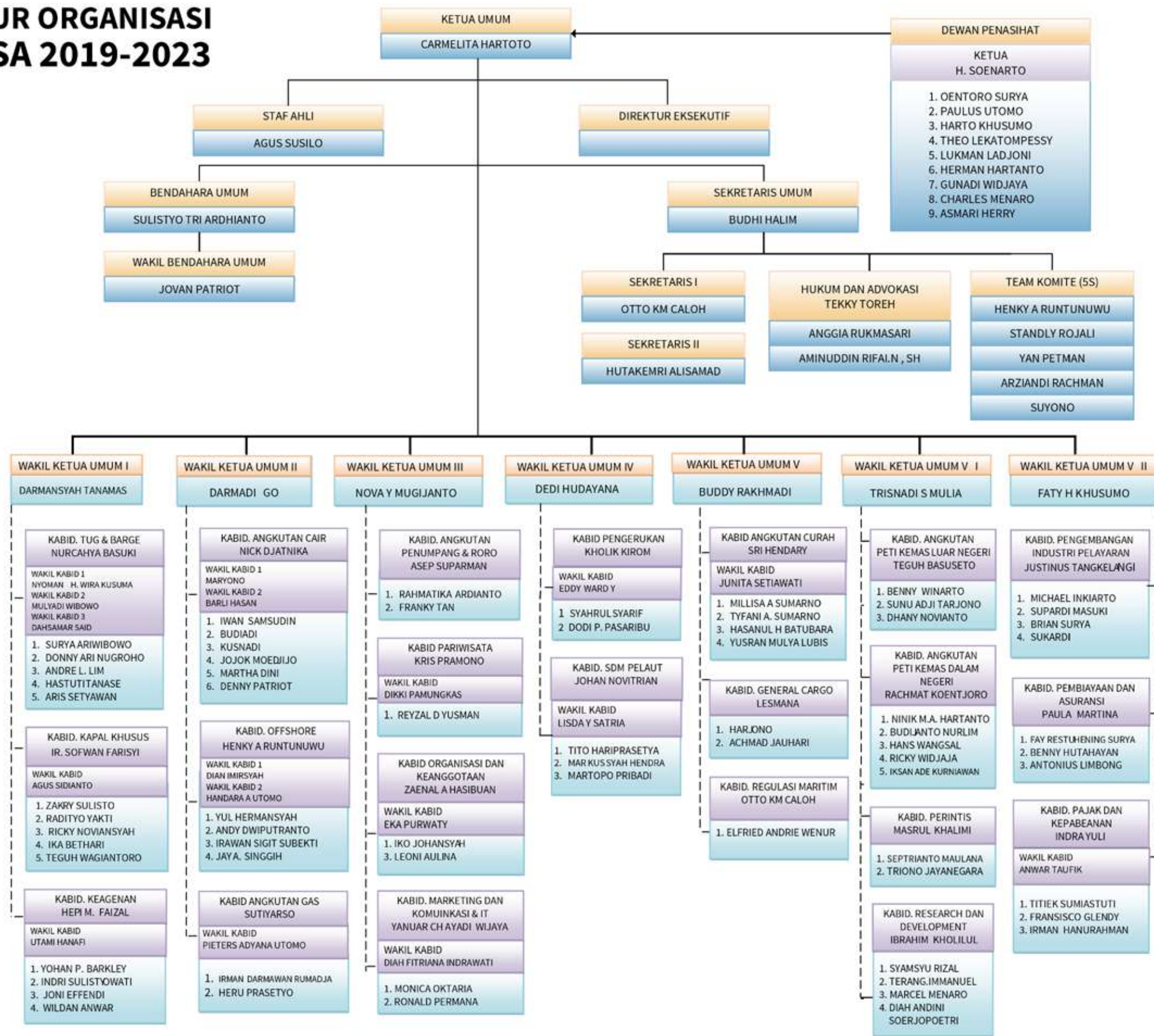
Susunan pengurus Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) periode 2019-2023 telah terbentuk. Penyusunan kepengurusan ini dilakukan usai terpilihnya Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum INSA periode 2019-2023 pada Rapat Umum Anggota (RUA) INSA Ke-XVII.

Susunan kepengurusan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor : 003 /Kpts/V/05-2020 Tentang Susunan DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Masa Bakti 2019-2023 tertanggal 08 Mei 2020.

Kepengurusan DPP INSA yang telah terbentuk ini berjumlah 129 orang, Dewan Penasihat berjumlah 10 orang, dan terdapat 23 bidang. Kepengurusan yang baru ini diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara DPP INSA dengan pemerintah dan stakeholder terkait. (\*)



# STRUKTUR ORGANISASI DPP INSA 2019-2023



# RAKOR SOSIALISASI LARANGAN MUDIK



Pengurus Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Capt. Witono Suprpto mengikuti video conference Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membahas Sosialisasi Larangan Mudik, Sabtu (25/04/2020).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang masyarakat melakukan mudik Ramadhan dan Lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

## RAPAT PEMBAHASAN PM 40 TAHUN 2020



Ketua Umum DPP INSA sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menghadiri rapat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan membahas PM 40 Tahun 2020 melalui zoom conference.

## INSA HADIRI RAPAT KEMENTERIAN EDSM



Pengurus DPP INSA Dian A. Imirsyah mengikuti Rapat dengan Direktorat Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen ESDM) dan Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Gas (Guspennigas).



## RAPAT BIDANG TUG AND BARGE INSA

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar rapat bidang tug and barge pada Jumat, (08/05/2020).

Rapat kali ini membahas sejumlah isu terkini pelayaran sektor tug and barge, khususnya terkait kesiapan sektor tug and barge menjalankan PM 40 Tahun 2020 dan menghadapi Covid-19.

Rapat yang digelar secara virtual melalui aplikasi zoom cloud meeting dipimpin langsung Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto. Adapun pelaku usaha tug and barge yang hadir antara lain Buddy Rakhmadi dan Darmansyah Tanamas. (\*)



## INSA HADIRI RAKOR KEMENHUB

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menghadiri Rapat Koordinasi Distribusi Logistik/ Bahan Kebutuhan Pokok pada masa Pandemi Covid-19.

Rapat dipimpin langsung Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dengan peserta terdiri dari lintas instansi mulai dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, Dinas Perhubungan dari beberapa provinsi, dan asosiasi juga operator transportasi, seperti INSA, Organda, PT Pelni dan PT ASDP.

Adapun, pengurus DPP INSA yang ikut hadir dalam acara ini seperti Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum III Nova Y. Mugijanto, Wakil Ketua Umum VII Fathy Kusumo, Wakil Ketua Umum VI Trisnadi Mulia, Pengurus DPP INSA Witono Soeprpto, Ketua Bidang Angkutan Penumpang & RoRo Asep Suparman dan Anggota Bidang Angkutan Petikemas dalam Negeri Iksan Ade Kurniawan.\*



Keluarga Besar DPP INSA  
Mengucapkan

Selamat Atas Pulihnya Kesehatan

*Bpk Budi Karya Sumadi  
Menteri Perhubungan RI*



**Dewan Pengurus Pusat  
Indonesian National Shipowners' Association  
(DPP INSA)**



Dewan Pengurus Pusat  
Indonesian National  
Shipowners' Association



*Selamat Hari  
Kenaikan Isa Almasih*



Dewan Pengurus Pusat  
Indonesian National Shipowners Association

*Selamat Hari Raya Waisak*



*Selamat Hari Raya  
Idul Fitri 1441 H*



**Ayo lawan Covid-19 bersama**



Jl. Tanah Abang III No 10, Jakarta  
Pusat.  
T: (62-21) 3850993, 3447149, 3849522  
F: (62-21) 3849522  
Email: [info@insa.or.id](mailto:info@insa.or.id)  
©: @dppinsa  
[www.insa.or.id](http://www.insa.or.id)